

Pencarian Dihentikan, Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Tetap Dilanjutkan

JAKARTA (IM) – Proses pencarian terhadap korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu telah dihentikan. Namun, Tim DVI Polri memastikan proses identifikasi terdapat para korban terus dilanjutkan.

“Kami dari tim DVI Polri tetap melakukan proses identifikasi,” kata Komandan DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kombes Hery Wijatmoko dalam jumpa pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (22/1).

Tim di RS Polri Kramat Jati telah mendapatkan data ante mortem dari 62 keluarga korban. Angka itu sesuai dengan manifes yang terdaftar sebagai penumpang pesawat tersebut.

“Kami dari tim DVI Polri tetap melakukan proses identifikasi, karena kami telah menerima pada hari ini se-

jumlah 62 data ante mortem dari keluarga karena laporan hanya 62, artinya hanya ada 62 laporan orang hilang yang ke tim DVI ante mortem,” ujar Hery.

Sementara itu, RS Polri saat ini juga sudah menerima sampel DNA untuk kebutuhan proses identifikasi melalui Ante Mortem sebanyak 714. Angka itu tercatat meningkat hampir tiga kali lipat.

Sedangkan, sejauh ini tercatat sudah menerima 325 kantong jenazah body part korban insiden jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Serta, ada 274 kantong properti. “Untuk sampel post mortem 540, mohon dipahami bahwa sejumlah sampel tersebut membutuhkan waktu untuk memprofil, menganalisa, mencocokkan data jadi data yang banyak itu nanti akan di profil nanti akan dicocokkan dalam fase rekonsiliasi,” kata Hery. ● han

PPKM Diperpanjang, DPR Minta Pemda Perketat Kegiatan Masyarakat

JAKARTA (IM) - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021. Hal ini dilakukan karena penyebaran virus corona yang belum juga terkendali.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong keseriusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam mengimplementasikan PPKM.

Azis mengatakan, meningkatkan penyebaran Covid-19 yang mengancam nyawa masyarakat, menunjukkan pemberlakuan PPKM harus ada yang diperbaiki dalam penanganan Covid-19 di daerahnya khususnya di daerah zona merah. Saat ini terjadi kenaikan jumlah daerah yang berada di zona merah dari semula 70 daerah kini mencapai 108 daerah pada pekan ini.

“Pemda yang berada di zona merah untuk memper-

ketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,” kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/1).

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengharapkan, aparat kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggalang operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19. Namun, aparat perlu terlebih dahulu menegur masyarakat sebelum menerapkan sanksi.

Selain itu, politik Partai Golkar ini menambahkan, pemda harus dapat meningkatkan dan memisalkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar.

“Juga meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalkan angka kematian serta kasus aktif di daerah,” tuturnya.

● mei



PENERIMA VAKSIN BERKOSTUM WAYANG
Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada penerima vaksin berkostum wayang Partika Subayo Lelono (kiri) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bung Karno, Solo, Jawa Tengah, Jumat (22/1). Aksi tersebut untuk memberikan dukungan terhadap program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah dengan menggunakan vaksin yang aman.

3 Kapal TNI AD Bawa Bantuan Kemanusiaan ke Kalsel dan Sulbar

JAKARTA (IM) - TNI AD mengerahkan tiga Kapal TNI AD (ADRI 50, ADRI 51, ADRI 52) yang mengangkut personel, bahan-bahan logistik, peralatan RS Lapangan serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.

Total bantuan logistik maupun perlengkapan dan peralatan penunjang lainnya terdiri dari beras 74.654 kilogram (74,6 ton), mie instan 14.109 dus, minyak goreng 1214 dus, Sarden/makanan kaleng 134 dus, biskuit 801 dus, susu 654 dus, vitamin 25 dus, air mineral 967 dus, tenda 28 unit, terpal 61 lembar, alas tidur/matras 251 lembar.

Lalu masker medis 57 boks, perlengkapan ibadah 639 dus, sanitiser 144 dus, alat mandi 52 dus, pampers dan pembalut 224 dus, selimut 696 lembar, kopi 11 dus, gula 556 kg, kecap 50 dus, obat 4 dus, botol susu 1 dus, makanan bayi 255 dus, handuk 2 koli, paket sembako 1122 paket, APD 9 koli, tissue 1 dus, sandal 1 dus, alat pertukangan dan genset 18 unit, sarung bantal 1 dus, jaket loreng 2 koli, aneka minuman 26 dus dan toren air kapasitas 1005 liter

4 buah.

Selain itu, barang maupun kendaraan yang diangkut adalah alat kesehatan 111 koli, peralatan perhubungan 28 koli, peralatan dapur lapangan 56 Koli, tenda serba guna 2 Koli, pemanas Naraga 11 koli, Naraga 312 Koli, Truk Fuso 5 Ton 1 unit, Truk NPS 2,5 Ton 3 unit, Dump Truck Hino 2 unit (berisi jembatan bailey), Crane Cargo 2 Unit, Truk Trado 1 Unit (berisi Jembatan bailey).

Peralatan pendukung lain yang juga dikirim adalah HT Icom 100 buah, repeater link icom 2 set, radio SSB 2 set, accu 120 ah 10 buah, solar cell 1000 watt 6 buah, solar cell arjuna 25 buah, veldbed aluminium dan selimut 1.000 set, meja lapangan 120 buah, kursi lapangan 60 buah, tenda serba guna 8 set, kompor T-50 12 set, alat dapur lapangan 34 Item 12 set, ompreng 1.500 buah, 1 truk tangki air, 1 hilux kendaraan dansatgas, 2 unit sepeda motor, jembatan acrow panel 1 set (13 petak), alat berat excavator PC 70 4 unit, backhoe loader 2 unit, truck cargo 2 unit, dump truck 2,5 ton 2 unit, truck tangki air 1 unit, mobil RO 1 unit, sepeda motor rail 6 unit dan mobil Mitsubishi Strada 1 unit. ● mei

2 | Polhukam



Komnas HAM akan Monitor Polri dalam Menangani Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI

Presiden Jokowi meminta kepolisian menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di jalan tol beberapa waktu lalu.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan

mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengawal hasil rekomendasi

mereka terkait kasus tewasnya enam anggota Laskar FPI. Bahkan, mereka akan mengawal secara keseluruhan proses dan tahapan yang nantinya dilakukan polisi.

“Komnas HAM akan memonitor setiap tahap dan proses yang dilakukan oleh kepolisian,” ucap Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara ketika dikonfirmasi melalui pesan

singkat, Jumat (22/1).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan seluruh komisioner Komnas HAM di Istana Bogor, Kamis 14 Januari 2021. Saat itu, Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar rekomendasi ditindaklanjuti.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, dalam pertemuan penyerahan hasil investigasi, Jokowi memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

“(Presiden) akan memberikan arahan yang jelas kepada Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM, itu yang kami sebut tadi sebagai proses hukum di

peradilan pidana nantinya,” kata Taufan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat.

Calon tunggal Kapolri yang baru saja disetujui DPR Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, saat fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (20/1), mengatakan, pihaknya akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM terkait extra judicial killing di KM 50 tersebut.

“Terkait masalah kejadian extra judicial killing yang direkomendasikan Komnas HAM, kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas,” kata Listyo saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Dimiyati Natakusumah. ● han

DPR Kirimkan Surat Persetujuan Listyo Sigit sebagai Kapolri ke Presiden

JAKARTA (IM) - Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru, menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa purna tugas. Kemudian, DPR secara resmi telah menyerahkan surat persetujuan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat persetujuan tersebut diserahkan Sekretaris Jendral DPR Indra Iskandar kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (22/1).

Indra menyampaikan bahwa, surat persetujuan Kapolri terpilih yaitu Listyo

fit and proper test Listyo pada Rabu (20/1).

Adapun laporan dari Komisi III terkait pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri dan persetujuan pengangkatan Komjen Listyo sebagai pengganti Idham dibacakan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

“Sidang dewan yang kami hormati sekarang berkenan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?” kata Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (21/1).

“Setuju ...,” jawab anggota DPR serentak. ● mei

KASUS DUGAAN KORUPSI Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung

JAKARTA (IM) - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung kembali memeriksa Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan, bernisial S terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, saksi S diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saksi S selaku Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan diperiksa terkait dengan Tipikor pada pengelolaan keuangan, dan dana investasi oleh badan pengelola jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” kata Leonard dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan,

Jumat (22/1).

Hingga Kamis (21/1), Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang saksi.

“Periksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang Tipikor pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Status kasus dugaan korupsi ini telah naik dari penyidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.

Menurut Jam Pidsus Ali Mukartono, kasus dugaan korupsi PT BPJS Ketenagakerjaan mirip seperti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Diduga terjadi penyimpangan pada saham dan reksadana di BPJS Ketenagakerjaan.

“(Kasus BPJ Ketenagakerjaan) Hampir sama kayak Jiwasraya. Itu kan terkait investasi juga. Dia punya duit investasi keluar. Uang negara pokonya,” kata Ali saat ditemui di Gedung Bunder, Kejaksaan Agung, Selasa 19 Januari 2021.

Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung RI.

“BPJAMSOSTEK siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan,” jelas Utoh dalam keterangan tertulis. ● han



KEDATANGAN VAKSIN TAHAP TIGA DI BALI
Petugas memindahkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac dari pesawat udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (22/1). Provinsi Bali menerima pengiriman vaksin Sinovac tahap ketiga sebanyak 25.320 dosis yang dikirimkan melalui transportasi udara.

Satgas Pantas Baku Tembak dengan KKB di Intan Jaya Papua

JAKARTA (IM) - Pasukan TNI baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Ditiigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1).

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menuturkan, kontak tembak mulanya terjadi pada pagi hari sekira pukul 06.30 WITA.

“Info dari lapangan benar terjadi kontak tembak antara KKB dengan Satgas Pantas di Kampung Ditiigi, Distrik

Sugapa Intan Jaya mulai pukul 06.30 WITA,” ujar Suriastawa.

Lebih jauh dia menuturkan, hingga saat ini kontak tembak tersebut masih berlangsung.

Menurutnya, informasi detail terkait dengan baku tembak tersebut akan segera disampaikan jika kondisi di lapangan sudah aman terkendali.

“Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak ya. Untuk lebih detailnya akan saya infokan setelah kondisi di lapangan aman terkendali,” tuturnya. ● mei

Dirut PT MIT Hiendra Soenjoto Didakwa Suap Nurhadi dan Menantunya Rp45 Miliar

JAKARTA (IM) - Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto didakwa menyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi melalui menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, sebanyak Rp45 miliar.

“Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan uang sejumlah Rp45.726.955.000 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Nurhadi selaku Sekretaris Mahkamah Agung tahun 2016 melalui Rezky Herbiyono,” ujar Jaksa penuntut umum pada KPK, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (22/1).

Suap itu dimaksudkan agar Nurhadi dan Rezky Herbiyono mengupayakan penguasaan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

“Gugatan melawan Azhar Umar terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT MIT,” kata jaksa KPK.

Jaksa KPK menjelaskan, sejak 2014 sampai 2016, terdakwa selaku Direktur Utama PT MIT mempunyai permasalahan hukum dengan PT KBN pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Hal itu terkait gugatan perjanjian sewa-menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Keca-

matan Cilincing Jakarta Utara serta gugatan perdata melawan Azhar Umar terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT MIT.

“Selanjutnya terdakwa menghubungkan Nurhadi melalui Rezky Herbiyono untuk mengupayakan pengurusan permasalahan hukum tersebut,” kata Jaksa KPK.

Atas permohonan Hiendra kemudian Nurhadi dalam jabatannya selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI yang mempunyai kewenangan di antaranya melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, bersama Rezky Herbiyono mengupayakan pengurusan permasalahan hukum tersebut.

Atas ulahnya, Jaksa mendakwa Hiendra diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hiendra juga diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ● han